

**IMPLEMENTASI  
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)  
(Studi Kasus Gapoktan Tri Langgeng  
Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi)**

**Cindhera Rian Pangestika, Sjamsiar Sjamsuddin, Suwondo**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang

E-mail: cindherarp@gmail.com

**Abstract: Implementation of Rural Agribusiness Development Program (PUAP).** Development of the national economy based on agriculture and rural areas directly or indirectly will have an impact on reducing poverty. Agricultural development aimed to improve the incomes and welfare of the public, especially farmers and agricultural business. Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is a groundbreaking program of the Ministry of Agriculture for tackling poverty and job creation, while reducing the development gap between regions and regional centers as well as the gap between sub-sectors. East Java Province is a province that is the main activity of the majority population to grow rice, one of the districts in East Java who rely on the agricultural sector is Ngawi. Gapoktan Trilanggeng Ngompro Village Pangkur District of Ngawi district has received assistance program since 2011. Implementation PUAP in Gapoktan Tri Langgeng there are some who have succeeded and some have failed. This failure causes the farmers do not benefit and even had to return the initial capital. because this question whether PUAP in this Gapoktan Tri Langgeng actually can increase farmers' income, or may even add to the burden on farmers when there is a failure. And whether the implementation of the program in Gapoktan Tri Langgeng PUAP has been going well.

**Keywords:** Implementation, PUAP Program, Gapoktan

**Abstrak: Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).** Ekonomi nasional dibangun dengan berbasis pertanian dan perdesaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada penurunan penduduk miskin. Pembangunan dalam pertanian bertujuan untuk rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat utamanya petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Program PUAP berasal dari Kementerian Pertanian yang tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang kegiatan utama penduduknya mayoritas menanam padi, Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengandalkan sektor pertanian adalah Kabupaten Ngawi. Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi telah menerima bantuan program PUAP sejak tahun 2011. Pelaksanaan PUAP di Gapoktan Tri Langgeng ini beberapa ada yg berhasil dan beberapa ada yang gagal. Kegagalan ini menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan dan bahkan harus mengembalikan modal awal. karena ini timbulah pertanyaan apakah PUAP di Gapoktan Trilanggeng ini benar-benar dapat meningkatkan pendapatan petani atau bahkan malah menambah beban petani apabila ada kegagalan. Serta apakah implementasi program PUAP di Gapoktan Tri Langgeng telah dijalankan dengan baik.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program PUAP, Gapoktan

---

### **Pendahuluan**

Kemiskinan yang ada di perdesaan merupakan masalah utama nasional yang penanganannya tidak bisa ditunda dan merupakan prioritas pertama dalam implementasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data (BPS) Sampai

dengan bulan Maret 2013 jumlah penduduk miskin 28.07 juta jiwa. Sekitar 63.2% persen dari jumlah tersebut tinggal di perdesaan berpencaharian utama di sektor pertanian serta 80% berada di skala usaha mikro. Pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pertanian dan

perdesaan pasti berdampak pada pengurangan penduduk yang miskin.

Pembangunan pertanian bertujuan dalam meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat yang menjadi petani dan pelaku usaha di bidang pertanian. Pencapaian tujuan yaitu kegiatan pembangunan pertanian menginginkan termanfaatkannya semua potensi yang di masyarakat, baik potensi manusia, sumberdaya alam, teknologi, dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan selalu menjaga kelestarian yang ada dilindungi (Kementerian Pertanian, 2014).

Program PUAP yang merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan pembangunan yang ada antar wilayah pusat dengan daerah serta kesenjangan antar subsektor yang ada. Program PUAP diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang PUAP.

Program PUAP dimulai sejak tahun 2008 yang berupa pemberian bantuan modal kepada pemilik dan atau petani penggarap skala kecil, petani atau peternak, buruh tani ataupun rumah tangga tani yang penyalurannya melalui Gapoktan selaku sebagai pelaksana program PUAP. Hal ini dilakukan dengan tujuan Gapoktan dapat menjadi lembaga ekonomi yang dipunyai dan dikelola oleh petani. Pemberian dana PUAP diutamakan untuk daerah-daerah yang tertinggal namun yang memiliki potensi pengembangan agribisnis (Kementerian Pertanian, 2014).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang kegiatan utama penduduknya mayoritas menanam padi dengan hasil produksi 12.049.342 ton pada luas lahan 2.037.021 Ha, dimana 32% kebutuhan beras nasional berasal dari Jawa Timur (BPS 2014). Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mengandalkan sektor pertanian adalah Kabupaten Ngawi. Dari 129.598 Ha luas wilayah Kabupaten Ngawi 72 persen diantaranya berupa lahan sawah, hutan dan tanah perkebunan Pada tahun 2007 luas lahan pertanian mencapai 83% dari luas wilayah Kabupaten Ngawi, hasil pertanian di Kabupaten Ngawi sebagai penyangga kebutuhan beras di Jawa Timur khususnya dan nasional umumnya. Produksi padi per hektar pada tahun 2011 sebesar 61,19 kwintal per hektar membuat kabupaten ini sebagai salah satu penghasil padi terbesar dan mendapat predikat lumbung padi di Provinsi Jawa Timur (Ngawikab.go.id).

Berdasarkan keterangan Sugimun (Ketua Gapoktan Tri Langgeng) salah satu kecamatan di

kabupaten ngawi yang mayoritas penduduknya petani yaitu Kecamatan Pangkur. Sebagai kecamatan yang mayoritas penduduknya adalah petani, tentu juga harus memiliki kelembagaan petani yang berkembang dan mandiri agar petani lebih optimal melaksanakan usaha taninya untuk meningkatkan hasil produksinya, salah satunya melalui Gapoktan. Di Kecamatan Pangkur Gapoktan yang telah berdiri lama di banding dengan yang lainnya yaitu Gapoktan Trilanggeng Desa Ngompro. Sejak tahun 2008 Gapoktan ini telah berdiri.

Berdasarkan keterangan Sugimun (Ketua Gapoktan Tri Langgeng) Gapoktan Trilanggeng telah menerima bantuan program PUAP sejak tahun 2011. Pelaksanaan PUAP di Gapoktan Tri Langgeng ini beberapa ada yg berhasil dan beberapa ada yang gagal. Kegagalan ini menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan dan bahkan harus mengembalikan modal awal. karena ini timbulah pertanyaan apakah PUAP di Gapoktan Trilanggeng ini benar-benar dapat meningkatkan pendapatan petani atau bahkan malah menambah beban petani apabila ada kegagalan. Serta apakah implementasi program PUAP di Gapoktan Trilanggeng telah berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Implementasi Program PUAP di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi? (2) Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat program PUAP di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi?

Tujuan Penelitian adalah (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan Implementasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor pendukung dan penghambat program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Administrasi Publik

Menurut Henry dalam Indradi (2010) Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab (Widodo, 2007) implementasi diartikan sebagai “menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu”; “menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”. Implementasi artinya sarana yang disediakan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dapat menimbulkan akibat/dampak kepada sesuatu tertentu. Wijaya dan Supardo (Pasolong, 2011) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses metransformasikan rencana ke dalam praktik.

Widodo (2007) mengatakan Implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahapan dari proses kebijakan publik dan juga studi yang sangat penting. Karena sebaik-baiknya suatu kebijakan, kalau tidak direncanakan dan dipersiapkan secara baik dalam pengimplementasiannya, maka tujuan dari kebijakan tidak akan dapat diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan.

Menurut Widodo (2007) proses implementasi suatu kebijakan publik mencakup antara lain:

- a. Tahap interpretasi  
Tahap Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang sebelumnya bersifat abstrak ke dalam kebijakan yang lebih bersifat teknis operasional.
- b. Tahap pengorganisasian
  - (1) Pelaksana Kebijakan (*policy implementor*)
  - (2) Standar Prosedur Operasional (*Standard Operating Procedure*)
  - (3) Sumber Daya Keuangan dan Peralatan.
  - (4) Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
  - (5) Penetapan Jadwal Kegiatan
- c. Tahap aplikasi.  
Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Tahap aplikasi merupakan perwujudan dari pelaksanaan masing-masing kegiatan dalam tahapan yang telah disebutkan sebelumnya.

Beberapa Model Implementasi Kebijakan Publik pertama Model Implementasi Kebijakan

Publik Van Horn dan Van Meter (Nugroho, 2008) model ini bahwa implementasi kebijakan berjalan linier antara kebijakan publik, implementor, serta kinerja kebijakan publik. Variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. komunikasi antar organisasi dan Aktivitas implementasi.
- b. Kecenderungan (*disposition*) pelaksana/Implementor
- c. Karakteristik agen pelaksana/ implementor.
- d. Kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Yang kedua adalah model implementasi Mazmanian dan Sabatier (1983) dalam (Subarsono, 2012). yang mengemukakan tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu antara lain adalah: sebuah karakteristik kebijakan (*Ability of statute to structure implementation*), karakteristik dari masalah (*Trackability of the problem*), dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*).

Ketiga Menurut Grindle (Subarsono, 2012) terdapat dua variabel besar yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu isi lingkungan implementasi (*context of implementation*) dan kebijakan (*content of policy*). Variabel tersebut masing-masing masih dibagi lagi menjadi beberapa hal. Diterangkan oleh Subarsono (2012 h.93). Variabel isi kebijakan ini mencakup (1) apakah sebuah program telah didukung oleh sumber daya yang memadai. (2) manfaat yang diterima oleh target groups. (3) ada perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan yang dibuat. (4) apakah sebuah program sudah tepat pada letaknya. (5) apakah sebuah kebijakan telah menjelaskan implementornya dengan detail. (6) sejauh mana kepentingan target groups ada dalam isi kebijakan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah, Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana. Dalam hal ini program merupakan bagian dari dari perencanaan. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

### 3. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

PUAP adalah program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat menangan

kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan bagian dari implementasi program PNPM Mandiri yang dimana melakukan penyaluran bantuan modal untuk usaha dalam upaya menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian yang ada pada desa sasaran, yang diwujudkan melalui penerapan fasilitas bantuan suntikan modal usaha bagi petani.

Berdasarkan Departemen Pertanian (2008) mengartikan Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bekerjasama dan bergabung untuk meningkatkan perkonomi serta efisiensi usaha. Gapoktan terdiri atas kelompok tani yang ada dalam wilayah suatu wilayah administrasi desa atau yang berada dalam satu wilayah aliran irigasi petak pengairan tersier.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian Kualitatif yaitu wawancara atau penelaahan dokumen, pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif supaya dapat mendiskripsikan subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta lapangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Implementasi Program PUAP di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. a. Implementasi Program PUAP, b. Keberhasilan program PUAP berdasarkan indikator keberhasilan; (2) Faktor pendukung dan faktor penghambat program PUAP.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Situs penelitian ini yaitu di Gapoktan Tri Langgeng Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Sumber data dipenelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara, peneliti sendiri, catatan lapangan, dan informan. Analisis data menggunakan *Interactive Model* yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono(2009 h.247 yaitu reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

### Pembahasan

Implementasi program PUAP yaitu adanya Pelaksana Program, Komunikasi dan Koordinasi, sumber kebijakan, Sumber Dana dan Peralatan, operasi prosedur (*Standart Operating Procedure*), dan Jadwal Kegiatan.

#### 1. Sumber Kebijakan

Sumber kebijakan program PUAP di jelaskan secara rinci di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2010 Tentang Pedoman Umum PUAP. Yang terus di perbarui sampai pada tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Permentan/OT.140/1/2014 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Di dalam Permen program PUAP dijelaskan secara terperinci mulai dari latar belakang sampai pada evaluasi pelaporan program PUAP. Jadi Gapoktan Tri Langgeng dalam menjalankan Programa PUAP lebih mudah karena telah jelas dan terperinci di dalam Pedoman Umum yang terdapat di Permentan Nomor: 01/Permentan/OT.140/1/2014 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

#### 2. Pelaksana Program

Pelaksanaan program BLM PUAP Gapoktan Tri Langgeng pelaksana telah jelas dengan rinci bahwa Pelaksana dari pusat yaitu Bapak Sodik selaku ketua BLM-PUAP kabupaten Ngawi, Tim PMT dari kabupaten Ngawi yaitu Bapak Sunarno. Tim PPL dari Kecamatan Bapak Triono. Penanggung jawab BLM-PUAP Gapoktan Tri Langgeng (Ketua Gapoktan Tri Langgeng) Bapak sugimun, Bendahara Pelaksanan Bapak sukardi BLM-PUAP Gapoktan Tri Langgeng. Sekretaris BLM-PUAP Gapoktan Tri Langgeng Bapak Lamidi.

#### 3. Komunikasi dan Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam program BLM-PUAP Gapoktan Tri Langgeng ini yaitu: Musyawarah/Rapat Anggota Gapoktan Sebagai forum tertinggi dalam pelaksanaan PUAP yaitu musyawarah/rapat anggota, yang dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Musyawarah/rapat anggota dihadiri paling kurang dua pertiga dari jumlah anggota, PPL dan PMT.
2. Musyawarah/rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan anggota. Yaitun rapat setiap semester (6 bulan sekali)
3. Rapat *interen* Gapoktan setian 3 bulan sekali, yaitu pertemuan antara pengurus Gapoktan atau Penanggung jawab program BLM PUAP dengan peneriman bantuan PUAP didampingi PPL.”

#### 4. Sumber Dana dan Peralatan

Sumber dana yaitu dari Kementerian Pertanian, untuk gapoktan Tri Langgeng pada bulan maret 2011 mendapatkan Dana sebesar Rp. 104.000.000,00 (Seratus Empat Juta Rupiah) yang dananya dianggarkan pada APBN yang termasuk dalam dana PNPM dalam kementerian Pertanian. Peralatan yang digunakan merupakan

peralatan yang dimiliki Gapoktan yaitu peralatan secara administrasi antara lain 1 unit komputer, 1 Printer, Alat Tulis Kertas, Ruangan kantor, serta peralatan lainnya yang menunjang Program BLM PUAP. Pada petani peralatan didukung dengan ketersediaan peralatan yang dimiliki setiap petani penerima program BLM PUAP yaitu: *tractor*, cangkul, sabit, dan peralatan bantuan dari program lain yang diberikan kepada Gapoktan Tri Lenggeng oleh pemerintah yaitu *Vertical Dryer* adalah alat pengering padi, dapat digunakan ketika musim penghujan petani tidak dapat mengeringkan padi maka petani Gapoktan Tri Lenggeng menggunakan *Vertical Dryer*.

#### 5. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan Gapoktan Tri Lenggeng dalam pelaksanaan Program PUAP.

1. 1 Maret 2011 Kelompok Tani menyelenggarakan musyawarah/rapat anggota kelompok dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA); yang selanjutnya akan dilaksanakan 3 bulan sekali.
2. 1 Maret 2011 membuat RUK yang di ajukan pada Gapoktan
3. 1 Maret 2011 Pengisian formulir pembiayaan.
4. 1 Maret 2011 penyaluran perkembangan usaha dana BLM PUAP
5. 5 Maret 2011 penyerahan dana dari Ketua Gapoktan Trilenggeng kepada masing-masing Kelompok Tani.
6. Dan seterusnya setiap sebulan sekali diadakan laporan perkembangan usaha Gapoktan.
7. 1 Maret 2012 di laporkan distribusi hasil pendapatan dana BLM PUAP 2011/2012.
8. Dan selanjutnya Dana BLM PUAP ini di lanjutkan pengelolaannya terus menerus, terakhir laporan adalah pada tahun 2013 periode Maret 2013 sampai Maret 2014 dan pada bulan Februari 2015 program ini masih berlanjut.

#### 1. Faktor yang mendukung dan menghambat program PUAP di desa Ngompro kecamatan Pangkur kabupaten Ngawi.

##### a. Faktor Pendukung

###### 1. Faktor pendukung Internal

Pendukung internal antara lain adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu pengurus gapoktan yang dapat menjalankan tugasnya dalam program BLM PUAP dengan baik. Tersedianya peralatan yang dimiliki oleh masing-masing penerima BLM PUAP merupakan

pendukung internal dalam program BLM PUAP ini karena pada dasarnya BLM PUAP berupa dalam bentuk uang, jadi untuk mengelolanya membutuhkan peralatan pribadi yang dimiliki oleh masing-masing petani penerima BLM PUAP.

#### 2. Faktor pendukung Eksternal

Faktor pendukung eksternal yaitu tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) dimana di desa Ngompro ini tanahnya subur, dan tersedianya air untuk mengairi pertanian, serta peralatan yang dimiliki Gapoktan Tri Lenggeng dari bantuan program lain salah satunya *vertical dryer*, dan pupuk subsidi dari pemerintah dapat mendukung jalannya program BLM PUAP di Gapoktan Tri Lenggeng.

##### b. Faktor Penghambat

###### 1. Faktor penghambat Internal

Faktor penghambat internal berdasarkan keterangan ketua Gapoktan Tri Lenggeng yaitu, bahwa petani penerima BLM PUAP masih dalam taraf pembelajaran, dimana dalam tahun 2011 program BLM PUAP dijalankan di Gapoktan Tri Lenggeng petani masih belum paham bagaimana program BLM PUAP ini harus dijalankan, jadi masih dalam bimbingan ketua gapoktan. Dalam menjalankan program BLM PUAP pemikiran petani penerima BLM PUAP belum berkembang, belum mengetahui secara jelas manfaat yang di dapat dari BLM PUAP ini. Petani penerima bantuan BLM PUAP masih ada yang telat dalam pembayaran dana BLM PUAP.

###### 2. Faktor penghambat Eksternal

Cuaca yang buruk dimana pada saat musim kemarau ketersediaan air sangat susah, tetapi pada musim penghujan, hujan yang lebat dan angin kencang dapat merusak produk pertanian, hama menjadi salah satu musuh petani yang dapat merusak produk pertanian. dan naik turunnya harga produk pertanian menjadi masalah yang juga kerap dihadapi petani di Desa Ngompro, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi.

#### Kesimpulan

1. Implementasi merupakan hal penting untuk mencapai tujuan dari program BLM PUAP. Proses di dalam implementasi program BLM

- PUAP Antara lain adanya sumber kebijakan, Pelaksana Program, Komunikasi dan Koordinasi, standar operasi prosedur (*Standart Operating Procedure*), Sumber Dana dan Peralatan, serta Jadwal Kegiatan. Yang telah dijalankan dengan baik oleh Gapoktan Tri Langgeng. Semua Faktor penghambat
2. Faktor pendukung dan penghambat
    - a. Faktor pendukung Internal yaitu: Tersedianya SDM, dan peralatan yg dimiliki oleh masing masing penerima bantuan. Faktor pendukung Eksternal yaitu: Tersedianya SDA, yaitu alam yang subur, peralatan dari bantuan program lain, pupuk subsidi dari pemerintah.
    - b. Eksternal yaitu Cuaca, hama, pasar, naik turunnya harga.
    - c. Faktor penghambat Internal yaitu : Petani penerima bantuan PUAP masih dalam taraf pembelajaran, pemikiran yang masih sedikit alot dan belum berkembang. Telat bayar dana BLM PUAP.
    - d. Faktor penghambat indikator keberhasilan program BLM PUAP telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai pada indikator keberhasilan namun ada satu indikator yang tidak dapat dipenuhi oleh Gapoktan Tri Langgeng yaitu indikator keberhasilan outcome dimana meningkatnya jumlah petani penerima BLM PUAP.
- 

### Daftar Pustaka

- Dwidjowijoto, R. N. (2008) **Public Policy**. Jakarta, Elek Media Komputindo.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. (2006) **Dasar-dasar dan teori administrasi publik**. Malang, Agritek YPN.
- Kementerian Pertanian. (2011) **"Pedoman Umum PUAP"** [internet] Melalui: [www:http//kemenper.go.id/](http://kemenper.go.id/) [Diakses pada 19 September 2014].
- Moleong, L. J. (2010) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. (2008) **Karakteristik Kebijakn Publik**. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. (2001) **Pengertian Kebijakan Publik**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 29/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Jakarta, Kementerian Pertanian RI.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Jakarta, Pemerintah RI.
- Subarsono. (2012) **Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia**. Jakarta, Grasindo.
- Sugiyono. (2009) **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**. Bandung, Alfabeta.
- Syahyuti. (2007) **Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Sebagai Kelembagaan Ekonomi Di Perdesaan**. Bogor, Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian.
- Widodo, Joko. (2007) **Analisis Management Pertanian dan Kebijakan Publik**. Jakarta, Bumi aksara.